

TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RANGKAP JABATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Merio Susanto¹, Sutanto²

INTISARI

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris yang terbukti dan dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Pusat atas pelanggaran rangkap jabatan Notaris di Kota Bandar Lampung dan upaya Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kota Bandar Lampung.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, sedangkan sifatnya adalah deskriptif-analisis, jenis data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan secara langsung dengan responden dan narasumber, selanjutnya analisis data secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Melihat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengandung arti bahwa kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran rangkap jabatan tetap mempunyai kekuatan sebagai akta autentik, pembinaan dan pengawasan rutin dilakukan setahu sekali dan Majelis Pengawas dapat menindak Notaris yang diduga melakukan pelanggaran dengan adanya laporan atau tanpa laporan masyarakat.

Kata Kunci: kekuatan akta, rangkap jabatan, pembinaan dan pengawasan.

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

THE ACTIONS OF REGIONAL OVERSEER TO AGAINST NOTARY IF DOES OF VIOLATION DOUBLE EMPLOYMENT IN BANDAR LAMPUNG CITY

Merio Susanto³, Sutanto⁴

ABSTRACT

This thesis aims to find out and analyze the strength of a deed made by a notary that is proven and sanctioned by the Central Supervisory Board for violations of the dual Notary position in Bandar Lampung City and the efforts of the Regional Supervisory Council in guiding and supervising Notaries in Bandar Lampung.

This research uses empirical normative research, while its nature is descriptive analysis, the type of data of this study is primary data obtained through field research directly with respondents and informants, then the qualitative data analysis with inductive thinking methods.

Seeing the provisions of Article 17 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Position of Notary, it explains that the power of a deed made by a Notary who is proven to have violated concurrent positions still has power as an authentic deed, guidance and routine supervision is carried out to the best of your knowledge and the Supervisory Board can act against a notary who is suspected of committing an offense in the presence of a report or without a public report.

Keywords: the strength of the deed, dual position, guidance and supervision

³ Student of Master of Notary, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer of Master of Notary, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada